

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid – 19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi seluruh kehidupan manusia, baik itu aspek ekonomi, sosial, dan budaya, tak terkecuali aspek sosial yakni penanganan anak jalanan. Akibat Pandemi tersebut, penanganan anak jalanan pada Tahun 2020 dan 2021 cukup terabaikan dikarenakan berbagai hal. Penanganan yang semakin memburuk pada masa Covid-19 tersebut berakibat pada peningkatan eksploitasi anak, lingkungan yang memburuk, dan pendidikan yang terabaikan<sup>1</sup>. Permasalahan anak jalanan ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang kompleks bagi kota-kota besar di Indonesia dikarenakan dengan menjadi anak jalanan mereka telah kehilangan hak-hak seperti hak untuk sekolah, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan hak lainnya. Pada saat ini anak jalanan mudah ditemukan di persimpangan rambu lalu lintas, terminal, pasar, pertokoan, dan lain sebagainya. Umumnya anak jalanan yang berada di jalanan ini bekerja serabutan, mulai dari mengamen, mengemis, menjual koran sampai dengan menjadi pedagang asongan yang mana pekerjaan tersebut menjadi pilihan alternatif bagi anak jalanan untuk mencari uang<sup>2</sup>. Permasalahan lainnya yang dihadapi anak jalanan yaitu:

---

<sup>1</sup> Indriyani, I. L. (2021). *Anak Jalanan di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pendekatan Pemberdayaan Oleh Yayasan Rumah Impian* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

<sup>2</sup> Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup, dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, Jurnal Masalah- Masalah Sosial, 145-155

1. Pendidikan, banyak anak jalanan yang tidak bersekolah dan putus sekolah.
2. Intimidasi, menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa, kelompok lain, petugas dan razia
3. Penyalahgunaan obat dan zat adiktif, misalnya ngelem, minuman keras, pil BK dan sejenisnya
4. Kesehatan, rentan penyakit kulit, PMS, gonore, paru-paru
5. Tempat Tinggal, umumnya di sembarang tempat, di pemukiman kumuh, dan rumah singgah.
6. Resiko Kerja, misalnya tertabrak, penculikan, dan lain-lain
7. Hubungan dengan keluarga, umumnya renggang, dan bahkan sama sekali tidak berhubungan
8. Makanan, umumnya makan seadanya, kadang mengais dari tempat sampah<sup>3</sup>.

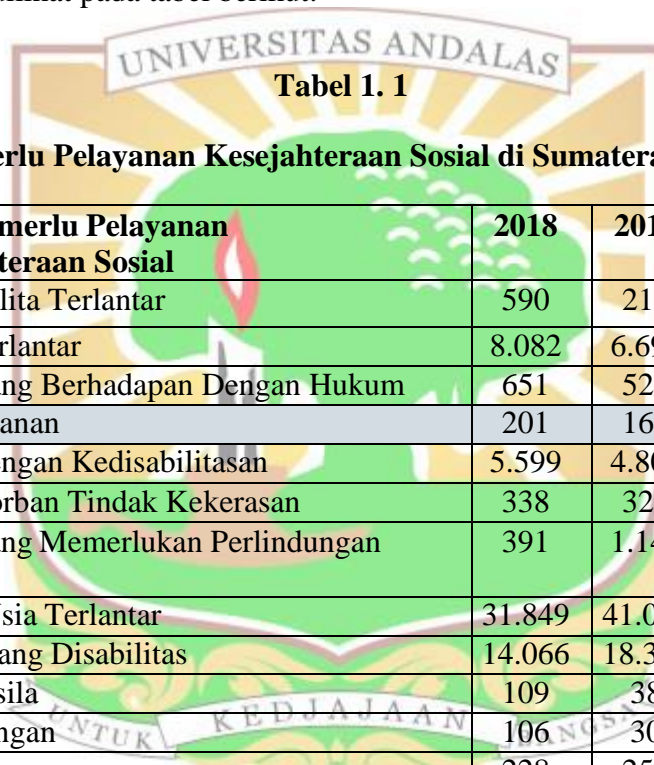
Permasalahan yang dihadapi anak jalanan tersebut dikarenakan beberapa faktor sehingga anak berada, tinggal hidup dan bekerja di jalanan. Keberadaan anak jalanan dominan disebabkan oleh kemiskinan atau ketidakmampuan keluarga (98%), disamping itu juga disebabkan adanya ketidakserasian keluarga (33%) dan kekerasan dalam keluarga (23 %). Kehidupan anak jalanan di kota pada umumnya berada pada lingkungan pemukiman dan lingkungan sosial yang luas dan bebas. Keberadaan anak jalanan inipun saat ini masih terasingkan dari kehidupan masyarakat karena pada

---

<sup>3</sup> Alfikri, R. *Kehidupan Sosial dan Eksploitas Anak Jalanan "Manusia Silver" di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

hakikatnya terdapat budaya anak jalanan yang tidak bisa disamakan dengan kehidupan normatif masyarakat pada umumnya<sup>4</sup>.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh anak jalanan membuat jumlah anak jalanan setiap tahunnya menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Padadata jumlah anak jalanan yang terdata pada Tahun 2021 di Indonesia yaitu sebanyak 9.113 anak<sup>5</sup>. Jumlah anak jalanan di Provinsi Sumatera Barat dari Tahun sebelum Pandemi bisa dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 1. 1**

**Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Barat**

No	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	2018	2019	2020
1	Anak Balita Terlantar	590	211	196
2	Anak Terlantar	8.082	6.691	5.861
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	651	520	461
4	Anak Jalanan	201	164	163
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	5.599	4.806	4.874
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	338	321	285
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	391	1.144	1.131
8	Lanjut Usia Terlantar	31.849	41.074	46.755
9	Penyandang Disabilitas	14.066	18.302	19.049
10	Tuna Susila	109	38	30
11	Gelandangan	106	30	20
12	Pengemis	228	258	135
13	Pemulung	359	312	233
14	Kelompok Minoritas	28	21	2
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	1.279	1.108	983
16	Orang dengan HIV/AIDS	675	524	472
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	820	376	324
18	Korban Trafficking	1	6	5
19	Korban Tindak Kekerasan	364	548	320

<sup>4</sup> Ansari, P. U. (2017). *Anak Jalanan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Penanganan Keluarga Terhadap Anak Jalanan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

<sup>5</sup> Kementerian Sosial Indonesia, Aplikasi SIKS-NG diambil pada 15 Februari 2023

20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	17	17	12
21	Korban Bencana Alam	13.850	9.226	24.288
22	Korban Bencana Sosial	1.010	914	590
23	Perempuan Rawan Sosial	15.081	24.869	23.481
24	Fakir Miskin	524. 025	569.95 5	569.80 5
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	752	1.026	875
26	Komunitas Adat Terpencil	177	176	124

Sumber: Badan Pusat Statistik ( BPS ) Sumatera Barat 2020

Berdasarkan pada Tabel 1.1 diatas jumlah anak jalanan sebelum Pandemi Covid-19 pada Tahun 2018 yaitu sebanyak 201 anak, 2019 sebanyak 164 anak, dan 2020 sebanyak 163 anak. Penurunan jumlah anak jalanan di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 dikarenakan tidak terdatanya keseluruhan anak jalanan oleh Satpol PP yang disebabkan oleh Pandemi Covid – 19 yang membuat penangkapan menjadi lebih terbatas saat PSBB.

**Tabel 1. 2**

**Jumlah Anak Jalanan Kabupaten / Kota di Sumatera Barat 2018-2020**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1.	Kabupaten Pasaman	1	1	1	3
2.	Kabupaten Agam	8	8	8	24
3.	Kabupaten 50 Kota	-	-	-	-
4.	Kabupaten Padang Pariaman	18	16	5	39
5.	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-	-
6.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-	-
7.	Kabupaten Sijunjung	-	-	-	-
8.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-	-
9.	Kabupaten Solok	-	-	-	-
10.	Kabupaten Dharmasraya	3	-	-	3
11.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-	-
12.	Kabupaten Mentawai	-	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Kota Padang</b>	<b>117</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>361</b>
14.	Kota Bukittinggi	-	9	8	17
15.	Kota Payakumbuh	25	5	5	35
16.	Kota Padang Panjang	-	-	-	-
17.	Kota Sawahlunto	10	-	-	10
18.	Kota Pariaman	8	-	-	8

19.	Kota Solok	11	3	14	28
	<b>Total</b>	<b>201</b>	<b>164</b>	<b>163</b>	<b>528</b>

Sumber : Buku Data PPKS dan PSKS Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 jumlah anak jalanan yang terdata terbanyak berada di Kota Padang dibandingkan dengan jumlah anak jalanan dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah anak 117 orang pada Tahun 2018, 122 orang pada Tahun 2019 dan 2020. Jumlah yang banyak ini membuat Pemerintah Kota Padang meninjau kasus anak jalanan dengan serius dengan tujuan mengurangi permasalahan dan kuantitas anak jalanan di Kota Padang.

**Tabel 1.3**

**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Padang**

No	Jenis PPKS	2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak Balita Terlantar	3	1	4	0	0
2	Anak Terlantar	1.260	1.300	1.264	1.255	2.110
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	105	128	40	75	50
4	<b>Anak Jalanan</b>	<b>117</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>43</b>	<b>40</b>
5	Anak Dengan Kedisabilitas	1.630	1.630	1.630	1.540	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	95	128	40	20	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	98	128	98	35	50
8	Lanjut Usia Terlantar	263	275	3.888	4.003	280
9	Penyandang Disabilitas	2.283	3.230	2.281	1.695	3.374
10	Tuna Susila	30	21	6	86	86
11	Gelandangan	65	3	65	22	-
12	Pengemis	35	25	35	11	11
13	Pemulung	87	88	87	-	-

Sumber : Padang Satu Data

Berdasarkan Tabel 1.3 jumlah anak jalanan di Kota Padang yang terdata pada Tahun 2021 sebanyak 43 orang dan 2022 sebanyak 40 orang, yang mana jumlah anak jalanan mengalami penurunan dikarenakan adanya program dalam penanganan anak jalanan di Kota Padang. Kenaikan jumlah anak jalanan ini dipicu oleh Pandemi Covid-19 yang mulai merebak sejak Tahun 2020. Dampak buruk dari Pandemi ini membuat pembinaan anak jalanan secara terpadu mengalami pemberhentian sementara diakibatkan berbagai hal, salah satunya anggaran yang di *refocusing* dalam penanganan Covid -19. Jumlah anak jalanan pada anak yang tercantum di Tabel 1.3 semestinya menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk bertindak lebih giat untuk mengatasi kasus peningkatan jumlah anak jalanan di Kota Padang, terutama untuk pencegahan dan penanganan kasus permasalahan anak masa yang akan datang.

**Tabel 1. 4**  
**Data Anak Jalanan Kota Padang**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Asal Daerah	Kegiatan
1.	Afisili Ramadhan	Laki-laki	19 tahun	Padang, suku Chaniago	Pengamen
2.	Agung Ramadhani	Laki-laki	20 tahun	Padang, suku Jambak	Pengamen
3.	Muhammad Fatir R	Laki-laki	12 tahun	Padang, suku Chaniago	Pengamen
4.	Kristin Natalia	Perempuan	12 tahun	Padang	Penjual Kantong Kresek
5.	Krismanto	Laki-laki	15 tahun	Nias	Penjual Kantong Kresek
6.	Adi Ananda Putra	Laki-laki	13 tahun	Batak	Manusia Silver

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 1.4 data anak jalanan di Kota Padang memiliki beragam asal daerah ada yang berasal dari kota Padang, Kabupaten Pasaman dan daerah lainnya seperti Nias dan Medan. Kegiatan yang dilakukan berbeda- beda ada yang mengamen, menjual kantong kresek, menjadi manusia silver dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan berbagai macam anak jalanan ini membuat Pemerintah Kota Padang membentuk program RASAILAH DAKU dalam penanganannya.

Pemerintah sendiri telah memiliki kebijakan yang mengatur perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penanganan anak jalanan sendiri sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen, Pengemis dan Pedagang Asongan Kota Padang. Peraturan Daerah tersebut menjelaskan penanganan anak jalanan dilakukan melalui berbagai usaha, yakni usaha preventif, usaha represif, dan usaha rehabilitasi. Dalam pelaksanaannya, turunan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 adalah Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembinaan Anak Jalanan. Peraturan Walikota tersebut menjadi dasar program RASAILAH DAKU dimana dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Pasal 16 yang menyebutkan usaha rehabilitasi sosial anak jalanan usia produktif dapat diberikan atau kegiatan dalam bentuk bimbingan mental spiritual, bimbingan dan pelayanan fisik, bimbingan sosial, bimbingan dan pelatihan keterampilan, bantuan stimulasi peralatan kerja, penempatan, pendidikan dan layanan konseling. Berdasarkan Peraturan tersebut berbagai instansi bertanggung jawab dalam pembinaan anak jalanan melalui usaha rehabilitasi sosial, salah satunya Dinas Sosial Kota Padang. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut

dalam penanganan anak jalanan Dinas Sosial Kota Padang membentuk Program yang bernama RASAILAH DAKU (Rangkul, Sayangi, Latihlah dengan Pendidikan Terpadu) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah dan permasalahan anak jalanan lainnya di Kota Padang.

Program RASAILAH DAKU berupa pelatihan secara mental, fisik dan spiritual kepada anak jalanan dengan *output* anak jalanan memiliki skill setelah dilatih, Program ini berjalan dengan baik tetapi sempat vakum selama 2 (dua) Tahun dikarenakan Pandemic Covid – 19, yang membuat penanganan anak jalanan melalui program ini diberhentikan sementara. Program ini diperuntukkan anak jalanan, Adapun kriteria anak jalanan yang dapat dibina yaitu anak yang berusia produktif. Adapun tujuan program ini yaitu untuk mewujudkan Visi yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Padang yakni meningkatkan kualitas penanganan permasalahan kemiskinan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan sosial. Untuk mendukung program RASAILAH DAKU dalam penanganan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Padang memiliki anggaran keuangan, yang mana keuangan di organisasi bersifat kaku, dimana anggaran yang tersedia hanya untuk program yang telah direncanakan. Jika perubahan terjadi, maka keuangan akan sulit disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi dan memungkinkan terjadinya kegagalan program. Melakukan sesuatu pasti akan menimbulkan resiko lain, namun tidak melakukan apapun juga beresiko, dimana terjadi kelambatan untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, hal ini bisa diakali dengan menyajikan anggaran normal dengan catatan kaki



yang terlampir<sup>6</sup>. Seperti anggaran pada program RASAILAH DAKU ini dari sumber kaku yakni dari APBD, yang tertuang pada DPA SKPD setiap tahunnya.

**Tabel 1. 5**  
**Anggaran Program RASAILAH DAKU Tahun 2021-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Output</b>
2021	Penanganan Anak Jalanan melalui Program	Penanganan Anak Jalanan Melalui Pola Pembinaan Terpadu	95.559.200	-	Persentase Penanganan Anak Jalanan
2022	RASAILAH DAKU	Penanganan Anak Jalanan Melalui Pola Pembinaan Terpadu	101.819.410	91.575.760	Persentase Penanganan Anak Jalanan.

*Sumber : Olahan Peneliti, 2023*

Pada Tabel 1.5 terlihat perbedaan anggaran setiap tahunnya, pada Tahun 2021 terdapat anggaran untuk program RASAILAH DAKU dalam Pola Pembinaan Anak Jalanan melalui Pembinaan Terpadu secara fisik di Batalyon Infanteri namun realisasi anggaran tidak terjalankan dikarenakan *refocusing* anggaran Covid-19. Anggaran program RASAILAH DAKU pada tahun 2021 dialihkan untuk Program Permakanan di anak- anak Panti Sosial, anak disabilitas, lansia selama Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022 pagu anggaran untuk program RASAILAH DAKU sebanyak Rp101.819.410 dapat direalisasikan sebanyak Rp91.575.760 yang dikurangkan sebanyak Rp10.243.650 untuk mencakup pembinaan anak jalanan

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 40

sebanyak 25 orang, jumlah realisasi anggaran berkurang dari pagu anggaran dikarenakan jumlah anak jalanan yang mengikuti kegiatan pembinaan anak jalanan tidak sebanyak perkiraan rancangan Dinas Sosial Kota Padang.

Pada program RASAILAH DAKU juga terdapat efektivitas kepemimpinan, yang mana kepemimpinan dinilai dari bagaimana upaya pemimpin untuk mendorong anggotanya ke arah tujuan yang ditetapkan. Namun dalam manajemen adaptif ini, hal itu telah berganti menjadi bagaimana pemanfaatan pengetahuan pemimpin terhadap perubahan yang terjadi dan kemudian diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan<sup>7</sup>. Peran seorang pemimpin dalam program ini mendorong munculnya tindakan adaptif di Dinas Sosial Kota Padang. Dalam kasus ini, kepemimpinan terlihat dari Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang. Kepala Dinas memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan luas daripada Kepala Bidang. Oleh karena itu, Kepala Dinas juga berhak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh tiap bidang dan bertanggung jawab atasnya dan berhubungan langsung dengan masing-masing kepala bidang agar lebih mudah berkomunikasi satu sama lain. Peran pemimpin Kepala Dinas dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial sebelum Pandemi Covid-19 pada program ini tampak jelas dikarenakan adaptasi program yang dijalankan kembali setelah vakum merupakan kegigihan kedua pemimpin dalam saling berkoordinasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, beliau menjelaskan bahwa

---

<sup>7</sup> Ferd H. Mitchell, Cheryl C. Mitchell, *Adaptive Administration Practice Strategies for Dealing with Constant Change in Public Administration and Policy*, (Boca Raton: CRC Press, 2016), hal 25-26

peningkatan jumlah anak jalanan setiap tahunnya melibatkan peran Dinas Sosial Kota Padang untuk menanggulangnya sehingga beliau dan Dinas Sosial Kota Padang harus mengetahui dan terlibat dalam pengambilan keputusan dalam program RASAILAH DAKU, contohnya pada kasus anak jalanan yang tertangkap oleh SatPol PP saat mengamen di jalanan.

*“Permasalahan anak jalanan di Kota Padang sangat beragam seperti ngelem, tawuran dan mengamen di lampu merah jalanan Kota Padang yang membuat ini hal yang serius untuk ditangani oleh pihak Dinas Sosial Kota Padang<sup>8</sup>.”* (Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Padang pada tanggal 14 Februari 2023 jam 10.00 WIB)

Peran Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial ini memberikan dampak pada kepemimpinan Kepala Dinas, yang mana pola kepemimpinan yang saling berkaitan satu sama lain di dalam Dinas Sosial Kota Padang terbentuk oleh koordinasi, kerjasama, dan tanggung jawab bersama. Bentuk kepemimpinan pada program ini juga beradaptasi dengan cepat, dikarenakan pada tahun 2020 sudah terjadi pergantian Kepala Dinas dan Kepala Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Padang.

Penanganan anak jalanan pada program RASAILAH DAKU ini beradaptasi dengan cepat melalui berbagai cara, begitupun pada tahap perencanaan yakni :

1. Tahap Pembentukan tim efektif, yang terdiri dari:
    - 1) Rapat Pembentukan Tim Efektif
    - 2) Penetapan SK Tim Efektif,
    - 3) Rapat Kerja Tim Efektif
-

Tahapan ini direncanakan pada bulan juni , pada tahapan ini aktor- aktor dalam program RASAILAH DAKU melakukan rapat yang dimulai dengan penyebaran undangan, lalu kegiatan yang mengisi daftar hadir yang menghasilkan notulensi.

2. Tahap Koordinasi, yang terdiri dari

1) Rapat Kerja Tim Internal dengan Tim Eksternal pada bulan juli, pada tahapan ini berisikan mengenai penjelasan tugas dan fungsi masing-masing *stakeholders* terkait

2) Penetapan rancangan kesepakatan Bersama yang berisikan draft kesepakatan bersama dengan *stakeholders*.

3) Penandatanganan kesepakatan Bersama dengan *stakeholder* terkait, pada tahapan ini adanya nota kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani *stakeholders* terkait dan diketahui oleh Walikota.

3. Tahap Pembuatan Panduan/Pedoman Penanganan Anak Jalanan Melalui Pola Pembinaan Terpadu di Kota Padang, pada bulan juli yang terdiri dari tahapan :

1) Penyusunan Konsep/Draft Panduan Penanganan anak jalanan melalui pola pembinaan terpadu di Kota Padang

2) Finalisasi Panduan penanganan anak jalanan melalui pembinaan terpadu di Kota Padang

4. Tahap Penjangkauan Anak Jalanan pada bulan agustus yang mana memberikan hasil jumlah anak yang dijangkau

5. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual pada bulan agustus, dengan berbagai tahapan yakni:

1) Periapan Materi Pembinaan, yang berisikan materi pelatihan

mental spiritual

- 2) *Launching* kegiatan Pembinaan mentak dan spiritual anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang yang direncanakan pada bulan agustus
- 3) Kegiatan Pembinaan mental dan spiritual anak jalanan yang direncanakan selama seminggu, yang memiliki jumlah anak jalanan yang dibina.
- 4) Penutupan kegiatan pembinaan mental dan spiritual anak jalanan yang direncanakan ditutup oleh Walikota Padang.

*“Perencanaan Program RASAILAH DAKU dilakukan seperti biasanya mengikuti perencanaan pada Tahun 2017 dengan berbagai perencanaan tahapan yang berkelanjutan setiap bulannya dengan memiliki target dan perencanaan anggarannya”* (Hasil wawancara peneliti dengan Kasi/Staf Pekerja Sosial Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia di Dinas Sosial Kota Padang pada tanggal 15 Februari 2023 jam 12.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa perencanaan dalam Program RASAILAH DAKU ini dibentuk oleh bidang Rehabilitasi Sosial yang berkoordinasi dengan aktor-aktor lainnya, yang mana program ini memiliki perencanaan dengan menggunakan rencana pembentukan hingga pelaksanaan program ini. Manajemen adaptif yang terdapat pada anggaran, perencanaan dan kepemimpinan, maka juga terdapat personel dalam pelaksanaan program RASAILAH DAKU, personel tersebut yaitu :

1. Dinas Sosial Kota Padang sebagai *leading sector* yang memiliki 39 personel yang terlibat. Peranan Dinas Sosial Kota Padang pada Program ini yaitu merancang program RASAILAH DAKU, menjalin kerjasama dengan aktor

– aktor lainnya, *assignment* data anak jalanan yang sudah di dapat dari SatPol PP Kota Padang.

Dalam proses *assessment* anak jalanan untuk mengikuti program RASAILAH DAKU, Dinas Sosial Kota Padang memiliki karakteristik anak jalanan yang akan dibina, yaitu :

- a) Anak Jalanan usia produktif yang berusia 6-18 tahun.
  - b) Anak jalanan yang berasal dari daerah Kota Padang.
  - c) Anak jalanan yang memiliki izin dari orang tua dalam pembinaan anak jalanan.
  - d) Anak jalanan yang melakukan kegiatan di jalanan seperti mengamen, menjadi manusia silver, menjual kantong kresek, dan kegiatan lainnya.
  - e) Anak- anak yang berada di jalanan 2-12 jam.
2. Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti sebagai pembina fisik anak jalanan yang memiliki 3 personel dalam pembinaan. Peranan Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti ini terdapat pada tahapan pembinaan anak jalanan, yang mana anak jalanan di latih secara fisik selama 7 (tujuh) hari.
  3. SatPol PP Kota Padang sebagai actor penangkapan anak jalanan di jalanan yang memiliki 6 orang personel dalam penangkapan. Peranan SatPol PP Kota Padang terdapat pada tahapan awal penangkapan anak jalanan, yang mana penangkapan dilakukan di berbagai lampu merah, jalanan di Kota Padang, anak jalanan yang sudah tertangkap di berikan ke Dinas Sosial Kota Padang.

4. Keluarga/ Panti Asuhan sebagai pendukung. Peranan keluarga disini menjadi pendukung anak jalanan dalam melakukan program RASAILAH DAKU, dengan adanya perizinan orang tua dapat membuat kegiatan menjadi lebih lancar , dan peranan Panti Asuhan yaitu sebagai pendukung anak jalanan yang tidak memiliki orang tua di Kota Padang serta sebagai tempat tinggal untuk anak jalanan yang tidak memiliki keluarga di Kota Padang.

Personel yang ada dalam program RASAILAH DAKU ini dapat membantu penanganan anak jalanan secara cepat. Adaptasi terjadi pada saat pasca Covid -19 jumlah aktor yang dahulunya sebelum Covid-19 lebih banyak dibandingkan pada saat ini, hal ini terjadi dikarenakan adanya pengurangan anggaran yang terjadi pada Tahun 2022. Dengan adanya perubahan yang terjadi pada pola kepemimpinan, anggaran, personel dan perencanaan ini membuat program RASAILAH DAKU beradaptasi secara cepat dalam penanganan anak jalanan.

Program RASAILAH DAKU yang berjalan sudah beberapa Tahun ini dan melewati masa Covid-19 memberikan dampak yang signifikan seperti jumlah anak yang sudah ditertibkan oleh aktor- aktor yang ada, berikut data anak jalanan yang sudah ditertibkan :

**Tabel 1. 6**

**Data Kasus Anak Jalanan di Kota Padang Yang Ditertibkan**

Nomor	Tahun	Jumlah
1	2015	29
2	2016	45
3	2017	78
4	2018	114
5	2019	122

6	2020	-
7	2021	-
8	2022	25

Sumber: Dinas Sosial Kota Padang 2022

Berdasarkan Tabel 1.6 jumlah anak jalanan yang ditertibkan setiap Tahunnya memiliki beragam jumlah, dan pada Tahun 2020 – 2021 tidak ada penertiban anak jalanan oleh Pemerintah Kota Padang yang dikarenakan Covid-19. Pada Tahun 2015 sebanyak 29 orang anak ditertibkan dengan cara penertiban biasa oleh SatPol PP Kota Padang, pada Tahun 2017 sebanyak 78 orang anak yang ditertibkan melalui Program RASAILAH DAKU, yang mana pada Tahun berikutnya seperti 2018 sebanyak 114 orang anak, dan 2019 sebanyak 122 orang anak jalanan yang ditertibkan, jumlah ini meningkat secara signifikan dikarenakan Program ini memberikan dampak yang nyata.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Pekerja Sosial Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Padang, yang mengatakan bahwa :

*“...Untuk membantu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kota Padang, salah satu program yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Padang yaitu Program RASAILAH DAKU , melalui kegiatan rehabilitasi sosial berupa penanganan anak jalanan yang dibina secara mental, fisik dan spiritual di Batalyon Infanteri selama beberapa hari . Program RASAILAH DAKU merupakan upaya menangani anak jalanan dengan mengadakan pembinaan mental berupa pelatihan fisik, tes psikologi anak, pengembangan bakat, pendidikan keluarga, bermain kelompok dan pembinaan spiritual berupa mengadakan sholat berjemaah zikir bersama, mengaji, muhasabah/ rukyah dan tausiyah. Serta pelatihan seperti: pelatihan sablon, karangan bunga, barbershop, bahkan Pendidikan non formal seperti mengajarkan baca tulis dan menggambar...”* (Hasil wawancara peneliti dengan Kasi/Staf Pekerja Sosial Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia di Dinas Sosial Kota Padang pada tanggal 23 November 2022 jam 10.00 WIB)



Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa Program RASAILAH DAKU memberikan *output* yang positif bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu anak jalanan sehingga tujuan Kota Padang dalam menangani anak jalanan dapat tercapai. Melalui Penanganan anak jalanan terpadu dapat diharapkan adalah berkurangnya jumlah anak jalanan yang mengikuti pergaulan yang salah sehingga dapat menunaikan hak – haknya untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan meningkatkan nilai kesetiakawanan sosial, rasa nasionalisme anak, dimana anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berdaya guna , mandiri serta berkarya.

Pelaksanaan program RASAILAH DAKU di Kota Padang belum berjalan optimal, berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan program RASAILAH DAKU. Pertama, dalam penanganan anak jalanan tidak semua anak jalanan yang mengikuti proses pembinaan dikarenakan berbagai hal, seperti Pro dan Kontra dari pihak keluarga anak jalanan yang mana program RASAILAH DAKU ini diselenggarakan tidak diikuti dengan kesadaran orang tua dalam mengawasi anak mereka. Orang tua dari anak jalanan tersebut seakan tidak peduli dan kurang peka terhadap mereka (anak jalanan). Kedua, Program RASAILAH DAKU pada Tahun 2020 dan 2021 sempat terhenti sementara dikarenakan *refocusing* Covid – 19. Akan tetapi, baru pada Tahun 2022 program RASAILAH DAKU dapat dilakukan kembali di tengah masih berlangsungnya Pandemic Covid-19.

Fenomena empiris yang terjadi yaitu jumlah anak jalanan di kota Padang setiap tahunnya meningkat dan menimbulkan berbagai macam masalah sosial di kota Padang , jumlah anak jalanan semakin bertambah saat Pandemi Covid-19 dikarenakan banyak anak jalanan yang tidak dapat dijangkau oleh SatPol PP Kota Padang dan penanganan yang terabaikan semasa pandemic Covid-19. Fenomena teoritis yakni dengan munculnya program RASAILAH DAKU dapat menangani permasalahan kuantitas dan kualitas di Kota Padang, tetapi program ini berhenti sementara pada masa Covid-19 yang membuat adanya adaptasi sesudah masa Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam bentuk perencanaan, anggaran, personel dan kepemimpinan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melihat bagaimana Manajemen adaptif program RASAILAH DAKU di masa Pandemi Covid-19 dalam penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang, dengan judul Manajemen Adaptif Program RASAILAH DAKU dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Padang.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan permasalahan Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah dikemukakan pada latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Manajemen Adaptif program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang terhadap anak jalanan melalui program RASAILAH DAKU?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Manajemen Adaptif

Program RASAILAH DAKU dalam penanganan anak jalanan di Kota Padang oleh Dinas Sosial Kota Padang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan terkhususnya dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi Departemen Administrasi Publik, dan secara umum dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan mahasiswa yang ada, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi kajian yang menyangkut tentang masalah penanganan anak jalanan khususnya pembinaan anak jalanan secara mental, fisik dan spiritual.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya, yang melakukan penelitian pada bidang yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga pada Pemerintah Kota Padang terutama instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui program dalam penanganan anak jalanan.
- c) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan di Pemerintah Kota Padang.